AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN

Erlina dan Rasdianto

Definisi

BELANJA

semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah (PSAP No.2, Paragraf 7).

kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. (Permendagri 13/2006)

BEBAN

Penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Tidak termasuk pembagian kepada penanam modal.

Beban telah diakui walaupun tidak terjadi arus keluar kas.

Beban terjadi dikarenakan penggunaan aset untuk kegiatan operasional entittas, misalnya beban penyusutan aset tetap

Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja Transfer

Belanja Lain-Lain

Belanja tidak Langsung

Belanja Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	2011
1	BELANJA	
2	BELANJA OPERASI	
3	Belanja Pegawai	xxx
4	Belanja Barang	xxx
5	Bunga	xxx
6	Subsidi	xxx
7	Hibah	xxx
8	Bantuan Sosial	xxx
9	Belanja Lain-lain	xxx
10	Jumlah Belanja Operasi (26 s/d 32)	xxx
11		
12	BELANJA MODAL	
13	Belanja Tanah	xxx
14	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx
15	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx
16	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx
17	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx
18	Belanja Aset Lainnya	xxx
19	Jumlah Belanja Modal	xxx
20	JUMLAH BELANJA	xxx
21		
22	TRANSFER	
23	DANA PERIMBANGAN	
24	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx
25	Dana Bsgi Hasil Sumber Daya Alam	xxx
26	Dana Alokasi Umum	xxx
27	Dana Alokasi Khusus	xxx
28	Jumlah Dana Perimbangan	xxx
29		
30	TRANSFER LAINNYA (disesuaikan dengan program yang ada)	
31	Dana Otonomi Khusus	xxx
31	Dana Penyesuain	xxx
33	Jumlah Transfer Lainnya	xxx
34	JUMLAH TRANSFER	xxx
35	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	xxx
36		
37	SURPLUS/DEFISIT	xxx

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	2011
1	BELANJA	
2	BELANJA OPERASI	
3	Belanja Pegawai	Xxx
4	Belanja Barang	xxx
5	Bunga	xxx
6	Subsidi	xxx
7	Hibah	xxx
8	Bantuan Sosial	xxx
9	Jumlah Belanja Operasi	xxx
10		
11	BELANJA MODAL	
12	Belanja Tanah	xxx
13	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx
14	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx
15	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx
16	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx
17	Belanja Aset Lainnya	xxx
18	Jumlah Belanja Modal	xxx
19	JUMLAH BELANJA MODAL	xxx
20		
21	BELANJA TAK TERDUGA	
22	Belanja Tak terduga	xxx
23	Jumlah Belanja Tak Terduga	xxx
24	Jumlah Belanja	xxx
25		
26	TRANSFER	
27	TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA	
28	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	xxx
29	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	xxx
30	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	xxx
31	Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab./Kota	xxx
32	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	xxx
33		
34	SURPLUS/DEFISIT	xxx

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	2011
1	BELANJA	
2	BELANJA OPERASI	
3	Belanja Pegawai	xxx
4	Belanja Barang	xxx
5	Bunga	xxx
6	Subsidi	xxx
7	Hibah	xxx
8	Bantuan Sosial	xxx
9	Jumlah Belanja Operasi	xxx
10		
11	BELANJA MODAL	
12	Belanja Tanah	xxx
13	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx
14	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx
15	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx
16	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx
17	Belanja Aset Lainnya	xxx
18	Jumlah Belanja Modal	xxx
19	JUMLAH BELANJA MODAL	xxx
20		
21	BELANJA TAK TERDUGA	
22	Belanja Tak terduga	xxx
23	Jumlah Belanja Tak Terduga	xxx
24	Jumlah Belanja	xxx
25		
26	TRANSFER	
27	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	
28	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	xxx
29	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	xxx
30	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	xxx
31	Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab./Kota	xxx
32	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	xxx
33		
34	SURPLUS/DEFISIT	xxx

Klasifikasi Beban

a. Beban Pegawai
b. Beban Barang
c. Beban Bunga
d. Beban subsidi
e. Beban hibah
f. Beban bantuan sosial
g. Beban penyusutan aset tetap/Amortisasi
h. Beban transfer
i. Beban lain-lain

- beban (*expense*) atau belanja memilik pengertian yang berbeda dengan biaya (*cost*).
- Biaya adalah sejumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset, sedangkan beban adalah biaya yang telah terjadi (*expired cost*).
- Tidak semua pengeluaran kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset dapat langsung menjadi beban pada periode yang bersangkutan apabila pengeluaran kas tersebut memiliki periode lebih dari satu tahun.
- Contoh, Pemerintah daerah membeli mobil untuk pustaka keliling.

- ✓ Pengakuan belanja dapat dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan sumber dana asal yang digunakan untuk pelaksanaan belanja tersebut. Kedua hal tersebut adalah:
  - ❖ Pengeluaran belanja melalui rekening kas umum Negara/daerah diakui ketika terjadi arus kas keluar dari rekening tersebut.
  - ❖ Pengeluaran belanja melalui kas di bendahara pengeluaran diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, atau dengan kata lain ketika SPJ Pengeluaran dinyatakan definitif.

- ✓ belanja badan layanan umum diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. (PSAP No.2, Paragraf 31-33)

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. (PSAP No.12, Paragraf 32).

- Beban harus sudah diakui apabila suatu entitas sudah memperoleh manfaat ekonomi walauun entitas tersebut belum melakukan pembayaran

- Beban harus diakui bila terjadi konsumsi penggunaan aset

- Beban diakui bila terjadi penuruanan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Pengakuan Akuntansi atas Belanja Barang Pakai Habis dan Belanja Modal

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- ❑ Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan
- ❑ Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual
- ❑ Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

- Perolehan barang menjadi aset tetap tersebut dengan maksud untuk digunakan dan tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga (untuk membedakannya dengan persediaan).

- Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

  1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara :
     - bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
     - bertambah umur ekonomis, dan/atau
     - bertambah volume, dan/atau
     - bertambah kapasitas produksi, dan/atau
  2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material
  3) Bila ada pengeluaran bersifat rutin untuk memperbaiki/memelihara aset tetap meskipun jumlahnya material dan menambah umur, tetap digolongkan sebagai revenue expenditure.

     Revenue expenditure mempunyai makna pengeluaran untuk mempertahankan kapasitas yang ada saat ini (*current year*).

- Pengukuran belanja/Beban yang menggunakan basis kas maupun akrual diakui dalam laporan keuangan sebesar nilai wajar yang akan dibayarkan atau yang akan dibayarkan.
- Belanja diakui sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dari rekening kas umum Negara/daerah.
- Nilai yang diakui meliputi nilai yang dibayarkan oleh pemerintah, bukan nilai yang seharusnya dibayarkan.
- Beban diukur berdasarkan (1) besaran timbulnya kewajiban, (2) besaran terjadinya konsumsi aset, dan (3) besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. (PSAP No.12, Paragraf 32)

1. Pengungkapan Belanja

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

- ✓ Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- ✓ Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
- ✓ Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada Permendagri No. 13 tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- ✓ Informasi lainnya yang dianggap perlu.

✓ Berikut ini, ilustrasi pengungkapan belanja dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

BELANJA	Anggaran 2011 (Rp)	Realisasi 2011 (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Tidak Langsung	……..	……..	……..
Belanja Langsung	……..	……..	……..
Belanja Pegawai	……..	……..	……..
Belanja Barang dan Jasa	……..	……..	……..
Belanja Modal	350.000.000	250.000.000 1)	100.000.000

Catatan atas Laporan Keuangan

Terdapat selisih lebih sebesar Rp.100.000.000,- untuk realisasi Belanja Modal dibandingkan anggarannya. Selisih lebih ini disebabkan terjadi efisiensi dalam pengadaan barang, khususnya dalam harga barang. Realisasi harga barang adalah lebih rendah dibandingkan dengan asumsi pada saat penyusunan anggaran, yaitu sebesar Rp.100.000.000,. Hal ini disebabkan adanya negosiasi/kesepakatan dengan pihak ketiga melalui proses lelang.

- Ilustrasi pengungkapan beban dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

Cuplikan Laporan Operasional untuk Beban

BEBAN	Jumlah 2011 (Rp)	Jumlah 2010 (Rp)
Beban Pegawai	500.000.000 [1)]	450.000.000
Beban Persediaan	40.000.000 [2)]	30.000.000
Beban Pemeliharaan	300.000.000 [3)]	300.000.000
Dst.		

Catatan atas Laporan Keuangan

1. Terjadi kenaikan beban pegawai
2. Beban persediaan merupakan beban persediaan ATK yang terjadi di tahun 2011.
3. Beban pemeliharaan sebesar Rp.300.000.000,- sesuai dengan tahun sebelumnya, merupakan beban pemeliharaan jalan

F. PERLAKUAN AKUNTANSI

1. Saldo Normal Rekening Belanja dan Beban
2. Pencatatan Akuntansi

a. Standar jurnal untuk mengakui beban akibat terjadinya konsumsi aset

Uraian	Debit	Kredit
Beban (nama aset)	xxxxx	
Aset (nama aset)		xxxxx

Contoh:
Pada akhir tahun diketahui persediaan ATK yang terpakai senilai Rp. 1.500.000,- maka jurnalnya adalah:

Uraian	Debit	Kredit
Beban ATK	1.500.000	
Persediaan ATK		1.500.000

b. Standar jurnal untuk mengakui beban akibat terjadinya kewajiban

Uraian	Debit	Kredit
Beban (nama kewajiban) Hutang (nama hutang)	xxxx	 xxxx

Contoh:

Belanja pegawai yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun sebesar Rp 30.000.000.

Uraian	**Debit**	**Kredit**
Beban Pegawai Hutang Beban Pegawai	Rp. 30.000.000,-	 Rp. 30.000.000,-

c. Standar jurnal untuk mengakui beban akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Uraian	Debit	Kredit
Beban Penyusutan ..... Akumulasi Depresiasi Aset Tetap	xxxx	 xxxx

Contoh:

Suatu Pemerintah daerah membeli mobil untuk pustaka keliling seharga Rp. 350.000.000 pada tanggal 15 januari 2012, dimana mobil tersebut diperkirakan mempunyai masa manfaat 10 tahun, diasumsikan mobil disusutkan dengan metode garais lurus, dimana nilai sisa mobil pada akhir tahun ke sepuluh diperkirakan Rp. 50.000.000,-. Maka penyusutan pertahun sebesar Rp. 30.000.000, jurnalnya adalah:

Uraian	Debit	Kredit
Beban Penyusutan Mobil Pustaka Keliling	30.000.000,-	
Akumulasi Depresiasi Mobil Pustaka Keliling		30.000.000,-

Pada saat kas telah dikeluarkan untuk belanja, terdapat dua kali pencatatan yaitu untuk penyusunan LO dan LRA. Untuk penyusunan LO, perlakuannya adalah beban bertambah dicatat di sisi debit, kas bendahara pengeluaran berkurang dicatat di sisi kredit. Untuk penyusunan LRA, belanja bertambah dicatat di sisi debit, silpa dicatat di sisi kredit.

Jurnal untuk mengakui pengeluaran kas untuk belanja untuk penyusunan LO.

Uraian	**Debit**	**Kredit**
Beban (nama beban)	xxxx	
Kas di bendahara Pengeluaran		xxxx

Jurnal untuk mengakui pengeluaran kas untuk belanja untuk penyusunanan LRA

Uraian	Debit	Kredit
Belanja (nama belanja)	xxxx	
Silpa		xxxx

Contoh:
Dibayar belanja pegawai sebesar Rp2.460.000.000,- Dari jumlah tersebut terdapat belanja pegawai dibayar dimuka sebesar Rp3.000.000. Pada akhir tahun belanja pegawai yang masih harus dibayar Rp30.000.000,-

Jurnal untuk mengakui pengeluaran kas untuk belanja untuk penyusunan LO.

Uraian	Debit	Kredit
Beban Pegawai	2.487.000.000	
Beban Pegawai dibayar Didepan	3.000.000	
Utang Beban Pegawai		30.000.000
Kas di bendahara Pengeluaran		2.460.000.000

Jurnal untuk mengakui pengeluaran kas untuk belanja untuk penyusunanan LRA

Uraian	Debit	Kredit
Belanja Pegawai	2.460.000.000	
Silpa		2.460.000.000

a. Akuntansi Belanja Pegawai

Contoh 1:

Pada tanggal 30 Mei 2011, bendahara SKPD menerima SP2D-LS Gaji (lihat SP2D-LS Gaji di halaman berikutnya) atas pengajuan SPM-LS Gaji sebesar Rp.143.570.000,- dan langsung mencairkannya di BPD. Kemudian uang yang telah diterimanya, dibayarkan langsung kepada pegawai. Berikut ilustrasi SP2D-nya.

PEMERINTAH DAERAH	Nomor : 05 SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
Nomor SPM : 002 Tanggal : Mei 2012 SKPD : SKPD ABC	Dari : Kuasa BUD Tahun Anggaran : 2012

Bank / Pos : BPD
Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari bank Rekening Nomor 01.02.01
Uang sebesar Rp. 127.837.000,-
(*Terbilang: Seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*)

Kepada :
NPWP : -
No. Rekening : 22.01.1.34567-4
Bank/Pos : BPD

Keperluan Untuk : Pembayaran Gaji Tunjangan Pegawai

(Kolom 3) NO.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	5.1.1.01.01	Gaji pokok	110.000.000,-
2	5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	12.000.000,-
3	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	8.700.000,-
4	5.1.1.01.06	Tunjanagn Beras	9.600.000,-
5	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh	3.270.000,-
		Jumlah	**143.570.000,-**

Potongan-potongan :

NO.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1.	Iuaran wajib Pegawai Negeri	11.842.000,-	
2.	Tab. Perumahan Pegawai	613.000,-	
3.	PPh psl. 21	3.278.000,-	
	Jumlah	15.733.000,-	

Informasi : *(tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)*

NO.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	PPN		
2.	PPh		
3.	.....		
	Jumlah		

SP2D yang Dibayarkan

Jumlah yang Diminta	Rp. 143.570.000,-
Jumlah Potongan	Rp. 15.733.000,-
Jumlah yang Dibayarkan	**Rp. 127.837.000,-**

Uang Sejumlah : *Seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*

Lembar 1 : **Bank Yang Ditunjuk**
Lembar 2 : **Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran**
Lembar 3 : **Arsip Kuasa BUD**
Lembar 4 : **Pihak Ketiga** *)

XXXXXX, Mei 2011
Kuasa BUD

(Teguh M)
NIP.196505221995012001

Jurnal pada saat penerbitan SP2D di **SKPKD** sebagai berikut:

Untuk Penyusunan Laporan Operasional (Basis Akrual)			
Tgl	**Uraian**	**Debit**	**Kredit**
30 Mei	R/K SKPD Kas BUD	143.570.000	 143.570.000

Untuk Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (Basis Kas)			
Tgl	**Uraian**	**Debit**	**Kredit**
	Tidak ada jurnal		

Jurnal pada saat penerimaan SP2D di **SKPD** sebagai berikut:

Untuk Penyusunan Laporan Operasional (Basis Akrual)			
Tgl	**Uraian**	**Debit**	**Kredit**
30 Mei	Kas Bend. Pengeluaran R/K PPKD	143.570.000	 143.570.000

Untuk Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (Basis Kas)			
Tgl	**Uraian**	**Debit**	**Kredit**
	Tidak ada jurnal karena bukan transaksi anggaran		

Jurnal saat Bendahara Pengeluaran membayarkan gaji ke pegawai di SKPD sebagai berikut:

Untuk Penyusunan Laporan Operasional (Basis Akrual)			
Tgl	**Uraian**	**Debit**	**Kredit**
30 Mei	Beban Gaji	143.570.000	
	Kas Bendahara Pengeluaran		143.570.000

Untuk Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (Basis Kas)			
Tgl	**Uraian**	**Debit**	**Kredit**
30 Mei	Belanja Gaji	143.570.000	
	Silpa		143.570.000

Contoh 2:

Pada tanggal 30 Mei 2011, bendahara SKPD menerima SP2D-LS Gaji (lihat SP2D-LS Gaji di halaman berikutnya) atas pengajuan SPM-LS Gaji sebesar Rp.143.570.000,- dan langsung dipindahbukukan ke rekening bank masing-masing pegawai, maka jurnalnya adalah sebagai berikut:

Jurnal pada saat penerbitan SP2D di **SKPKD** sebagai berikut:

Untuk Penyusunan Laporan Operasional (Basis Akrual)			
Tgl	**Uraian**	**Debit**	**Kredit**
30 Mei	R/K SKPD	143.570.000	
	Kas BUD		143.570.000

Untuk Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (Basis Kas)			
Tgl	**Uraian**	**Debit**	**Kredit**
	Tidak ada jurnal		

Jurnal pada saat penerimaan SP2D di **SKPD** sebagai berikut:

Untuk Penyusunan Laporan Operasional (Basis Akrual)			
Tgl	**Uraian**	**Debit**	**Kredit**
30 Mei	Beban Gaji	143.570.000	
	R/K PPKD		143.570.000

Untuk Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (Basis Kas)			
Tgl	**Uraian**	**Debit**	**Kredit**
	Belanja Gaji	143.570.000	
	Silpa		143.570.000

b. Akuntansi Belanja Barang dan Jasa

Pencatatan Belanja Barang dan Jasa terdapat dua pencatatan yaitu untuk keperluan penyusunan LO dan penyusunan LRA.

c. Belanja Modal

Pencatatan untuk belanja modal terdapat dua kali pencatatan, yaitu untuk keperluan penyusunan LO dan penyusunan LRA. Pencatatan transaksi belanja modal untuk keperluan penyusunan LO adalah aset tetap bertambah dan dicatat di sisi debit serta kas bendahara pengeluaran berkurang dan dicatat di sisi kredit. Selanjutnya, pencatatan transaksi belanja modal untuk keperluan penyusunan LRA, belanja modal bertambah dan dicatat di sisi debit, kas di bendahara pengeluaran berkurang dan dicatat di sisi kredit.

d. Belanja Tidak Langsung Non Belanja Pegawai

Contoh 1:

Pada tanggal 1 Maret 2012, bendahara pengeluaran membayar Bahan Pakai Habis berupa alat tulis kantor senilai Rp. 4.460.000,-. Nilai ini termasuk PPN 10% dan PPh pasal 22 Bendaharawan sebesar 1.5%.

Jurnal untuk penyusunan LO, saat pembelian dan pembayaran barang dan jasa di **SKPD** sebagai berikut:

Untuk Penyusunan Laporan Operasional (Basis Akrual)			
Tgl	**Uraian**	**Debit**	**Kredit**
1 Maret	Persediaan ATK	4.460.000	
	Kas Bendahara Pengeluaran		4.460.000

Untuk Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (Basis Kas)			
Tgl	**Uraian**	**Debit**	**Kredit**
1 Maret	Belanja Bahan Pakai Habis	4.460.000	
	Silpa		4.460.000

Jurnal untuk keperluan penyusunan LO, pada saat pemungutan pajak di **SKPD**, sebagai berikut:

Untuk Penyusunan Laporan Operasional (Basis Akrual)			
Tgl	**Uraian**	**Debit**	**Kredit**
1 Maret	Kas Bendahara Pengeluaran	460.000	
	Utang PPh 22		60.000
	Utang PPN		400.000

Untuk Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (Basis Kas)			
Tgl	**Uraian**	**Debit**	**Kredit**
	Tidak ada jurnal karena bukan transaksi anggaran		

Jurnal untuk keperluan penyusunan LO, pada saat penyetoran pajak, sebagai berikut:

Untuk Penyusunan Laporan Operasional (Basis Akrual)			
Tgl	**Uraian**	**Debit**	**Kredit**
1 Maret	Utang PPh 22 Utang PPN Kas Bendahara Pengeluaran	60.000 400.000	 460.000

Untuk Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (Basis Kas)			
Tgl	**Uraian**	**Debit**	**Kredit**
	Tidak ada jurnal karena bukan transaksi anggaran		

Misalkan, pada akhir tahun 2012, nilai persediaan yang tersisa Rp.460.000,-, maka jurnal untuk penyesuaikan nilai persediaan tersebut, untuk keperluan penyusunan LO, sebagai berikut:

Untuk Penyusunan Laporan Operasional (Basis Akrual)			
Tgl	**Uraian**	**Debit**	**Kredit**
31 Des	Beban Persediaan ATK	4.000.000	
	Persediaan ATK		4.000.000

Untuk Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (Basis Kas)			
Tgl	**Uraian**	**Debit**	**Kredit**
	Tidak ada jurnal karena tidak ada transaksi kas		

Contoh 2:

Pada tanggal 1 Maret 2012, bendahara pengeluaran membayar servis kendaraan kantor senilai Rp.300.000,-. Pencatatan untuk tramsaksi tersebut sebagai berikut :

Untuk Penyusunan Laporan Operasional (Basis Akrual)			
Tgl	**Uraian**	**Debit**	**Kredit**
1 Mar	Beban Pemeliharaan Kenderaan	300.000	
	Kas Bendahara Pengeluaran		300.000

Untuk Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (Basis Kas)			
Tgl	**Uraian**	**Debit**	**Kredit**
1 Maret	Belanja Pemeliharaan Kenderaan	300.000	
	Silpa		300.000

Contoh 3 :

Pada tanggal 2 Mei 2011, Bendahara Pengeluaran menerima SP2D LS senilai Rp.15.000.000,- untuk pembayaran kepada CV. Computa atas pembelian sebuah Laptop. Penjurnalan untuk transaksi tersebut sebagai berikut:

Jurnal pada saat penerbitan SP2D di **SKPKD** sebagai berikut:

Untuk Penyusunan Laporan Operasional (Basis Akrual)			
Tgl	**Uraian**	**Debit**	**Kredit**
2 Mei	R/K SKPD Kas BUD	10.000.000	 10.000.000

Untuk Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (Basis Kas)			
Tgl	**Uraian**	**Debit**	**Kredit**
	Tidak ada jurnal		

Jurnal pada saat penerimaan SP2D di **SKPD** sebagai berikut:

Laporan Operasional			
Tgl	**Uraian**	**Debit**	**Kredit**
2 Mei	Laptop	15.000.000	
	R/K PPKD		15.000.000

Laporan Realisasi Anggaran			
Tgl	**Uraian**	**Debit**	**Kredit**
2 Mei	Belanja Modal – Laptop	15.000.000	
	Silpa		15.000.000

Contoh 4

Pada tanggal 2 Mei 2011, diterbitkan SP2D untuk bantuan social/ belanja bunga/ belanja subsidi/ belanja hibah/ belanja tidak terduga kepada masyarakat sebesar Rp.100.000.000,-. Penjurnalan untuk transaksi tersebut sebagai berikut:

Jurnal pada saat penerbitan SP2D di **SKPKD** sebagai berikut:

Laporan Operasional			
Tgl	**Uraian**	**Debit**	**Kredit**
2 Mei	Beban Bantuan Sosial	100.000.000	
	Kas BUD		100.000.000

Laporan Realisasi Anggaran			
Tgl	**Uraian**	**Debit**	**Kredit**
2 Mei	Belanja Bantuan Sosial	100.000.000	
	Silpa		100.000.000

Sangat dimungkinkan terjadi koreksi terhadap belanja/beban di tahun anggaran berjalan. Koreksi beban dapat disebabkan atas beberapa kemungkinan yaitu:

- ✓ Kesalahan klasifikasi belanja/beban
- ✓ Kesalahan pencatatan nilai belanja/beban
- ✓ Pengembalian belanja/beban

Koreksi atas kesalahan/pengembalian belanja/beban dilakukan pada saat ditemukannya kesalahan/diterimanya pengembalian beban tersebut. Perlakuan akuntansi yang diterapkan sangat terkait dengan saat transaksi awal terjadi, apakah di tahun yang sama atau ditahun yang berbeda.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam lain-lain PAD yang sah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka koreksi tersebut diperlakukan sebagai:

1. Koreksi atas belanja (basis kas)

Jenis	Terjadi di Tahun Sebelumnya	Terjadi di Tahun yang Sama
Kesalahan klasifikasi	Tidak dilakukan jurnal koreksi	Dilakukan koreksi ke kode belanja yang sesuai
Kesalahan pencatatan nilai belanja	Dilakukan koreksi ke Sisa Anggaran Lebih	Dilakukan koreksi atas kekurangan/kelebihan jumlah ke kode rekening yang terkait.
Pengembalian belanja	Dicatat sebagai lain-lain PAD yang syah	Dicatat sebagai pengurang belanja

2. Koreksi atas Beban (basis akrual)

Jenis	Terjadi di Tahun Sebelumnya	Terjadi di Tahun yang Sama
Kesalahan klasifikasi	Tidak dilakukan jurnal koreksi	Dilakukan koreksi ke kode beban yang sesuai
Kesalahan pencatatan nilai beban	Dilakukan koreksi ke ekuitas	Dilakukan koreksi atas kekurangan/kelebihan jumlah ke kode rekening yang terkait.
Pengembalian beban	Dilakukan koreksi ke ekuitas	Dicatat sebagai pengurang beban

Contoh 1 :
Pengembalian belanja/beban UP/GU/TU pada periode yang sama di SKPD.
Pada tanggal 11 Mei 2012 diterima kembali belanja perjalanan dinas luar daerah bulan April 2012 sejumlah Rp. 5 juta.

Jurnal contoh 1:
Saat penerimaan pengembalian belanja/beban UP/GU/TU perjalanan dinas pada periode yang sama.

Untuk Penyusunan Laporan Operasional (Basis Akrual)			
Tgl	**Uraian**	**Debit**	**Kredit**
2 Jan	Kas di bendahara Pengeluaran Beban Perjalanan Dinas	5.000.000	 5.000.000

Untuk Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (Basis Kas)			
Tgl	**Uraian**	**Debit**	**Kredit**
	Silpa Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000	 5.000.000

Contoh 2 :
Pengembalian belanja/beban UP/GU/TU pada periode berikutnya di SKPD. Pada tanggal 2 Januari 2012 diterima kembali belanja perjalanan dinas luar daerah bulan Desember 2011 sejumlah Rp. 5 juta.

Jurnal contoh 2:
Saat penerimaan pengembalian belanja/beban UP/GU/TU perjalanan dinas pada periode yang berbeda.

Untuk Penyusunan Laporan Operasional (Basis Akrual)			
Tgl	**Uraian**	**Debit**	**Kredit**
	Kas Bend. Pengeluaran	5.000.000	
	Ekuitas		5.000.000

Untuk Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (Basis Kas)			
Tgl	**Uraian**	**Debit**	**Kredit**
	Silpa	5.000.000	
	Lain-lain PAD yang Syah		5.000.000

Contoh 3 :
Pengembalian belanja LS pada periode yang sama di SKPD.
Kelebihan tunjangan gaji pegawai yang terjadi pada bulan Mei 2012 di ketahui dan diakui pada tanggal 10 Juni tahun yang sama sebesar Rp 5.000.000.

Jurnal contoh 3:
Saat penerimaan pengembalian belanja/beban LS SKPD pada periode yang sama.

Untuk Penyusunan Laporan Operasional (Basis Akrual) di SKPD			
Tgl	**Uraian**	**Debit**	**Kredit**
2 Jan	Kas di bendahara Pengeluaran	5.000.000	
	Beban Tunjangan Gaji		
	(saat diterima di SKPD)		5.000.000
2 Jan	R/K PPKD	5.000.000	
	Kas di Bendahara Pengeluaran		5.000.000
	(saat di setor di BUD)		
Untuk Penyusunan Laporan Operasional (Basis Akrual) di PPKD			
Tgl	**Uraian**	**Debit**	**Kredit**
2 Jan	Tidak ada jurnal saat diterima di SKPD		
	Kas di Kasda		
2 Jan	R/K SKPD	5.000.000	
	(saat di setor di BUD)		5.000.000

Untuk Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (Basis Kas) di SKPD			
Tgl	Uraian	Debit	Kredit
	Silpa Belanja Beban Tunjangan Gaji (saat diterima di SKPD) Tidak Ada jurnal saat disetor di BUD	5.000.000	 5.000.000
Untuk Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (Basis Kas) di PPKD			
Tgl	Uraian	Debit	Kredit
	Tidak ada jurnal saat diterima di SKPD Tidak Ada jurnal saat disetor di BUD		

Contoh 4:
Pengembalian belanja LS pada periode yang beda di SKPD
Kelebihan tunjangan gaji pegawai yang terjadi pada bulan Desember Mei 2011 di ketahui dan diakui pada tanggal 5 Januari tahun 2012 sebesar Rp 5.000.000

Jurnal contoh 4:
Saat penerimaan pengembalian belanja/beban LS SKPD pada periode yang sama

Untuk Penyusunan Laporan Operasional (Basis Akrual) di SKPD			
Tgl	**Uraian**	**Debit**	**Kredit**
2 Jan	Kas di bendahara Pengeluaran	5.000.000	
	Ekuitas		5.000.000
	(saat diterima di SKPD)		
2 Jan	R/K PPKD	5.000.000	
	Kas di Bendahara Pengeluaran		5.000.000
	(saat di setor di BUD)		
Untuk Penyusunan Laporan Operasional (Basis Akrual) di PPKD			
Tgl	**Uraian**	**Debit**	**Kredit**
2 Jan	Tidak ada jurnal saat diterima di SKPD		
2 Jan	Kas di Kasda	5.000.000	
	R/K SKPD		5.000.000
	(saat di setor di BUD)		

Untuk Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (Basis Kas) di SKPD			
Tgl	Uraian	Debit	Kredit
	Silpa	5.000.000	
	Lain-lain PAD yang syah		
	(saat diterima di SKPD)		5.000.000
	Tidak Ada jurnal saat disetor di BUD		
Untuk Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (Basis Kas) di PPKD			
Tgl	Uraian	Debit	Kredit
	Tidak ada jurnal saat diterima di SKPD		
	Tidak Ada jurnal saat disetor di BUD		

SELESAI

PENERBIT : **CV BRAMA ARDIAN**
DESIGNER : **CHERRY MASTURI PRASAT**